

**PENGARUH NILAI-NILAI ISLAM
TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA
TATA KELOLA PERUSAHAAN
(Studi kasus pada perusahaan yang tercatat di JII 2016-2017)**

Muhamad Wildan Nur Hidayat
Adityawarman ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Corporate governance is an important for every company. There are many factor that influence voluntary corporate governance disclosure. This research examines the effect Islam values disclosure on voluntary corporate governance disclosure. In particular, this study examines whether companies that incorporate and disclose Islamic values in their business operations can explain the different levels of voluntary corporate governance disclosure.

The data used as objects in this study are companies that have been registered at the Jakarta Islamic Index (JII) in 2016-2017 consisting of 76 data that were used as objects in this study, namely companies that have registered at the Jakarta Islamic Index (JII) in 2016-2017 which consists of 38 companies. This study uses a simple linear regression analysis method because it only has one dependent variable measured using the Corporate Governance Index (CGI) and one independent variable measured using the Islamic Values Disclosure Index (IVDI).

From the results of this study it was found that disclosure of Islamic values had a positive effect on voluntary corporate governance disclosure. The higher the disclosure of Islamic values index score engage in higher the voluntary corporate governance disclosure index score.

Keywords : The Islamic Values, Corporate Governance, Valuntary Disclosure, Jakarta Islamic Index (JII)

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan memiliki peranan yang sangat berarti dan diperhatikan oleh setiap entitas perusahaan. Menurut Hussain dan Al-Najjar (2012), runtuhnya perusahaan seperti Bank Baring, Enron, dan Worldcom di negara berkembang, seperti Amerika dan Inggris pada tahun 1990/2000, yang disebabkan karena kurangnya praktik tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan dirasa sangat penting untuk diperhatikan ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997/1998 di Asia, yang ditunjukkan dengan adanya masalah ekonomi makro itu dapat diperburuk oleh kegagalan praktik tata kelola perusahaan di negara berkembang. Karena itu, kode etik tata kelola perusahaan dan pembaruan kebijakan telah diikuti di sebagian besar negara. Pembaruan-pembaruan dicoba untuk meningkatkan perusahaan yang lebih teratur dengan mendorong akuntabilitas dewan, disiplin, keadilan, independensi, responsibilitas, pengungkapan dan transparansi (Albassam, 2017)

Menurut FGGI (forum *corporate governance Indonesia*), tujuan dari adanya tata kelola perusahaan yaitu dapat memberikan nilai tambah (*value added*) untuk perbagai pihak yang memiliki kepentingan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga dapat menambah nilai perusahaan dan diharapkan perusahaan dapat menambah kemampuan

¹ Corresponding author

atau kinerjanya pada sektor keuangannya, dan juga mengurangi resiko dari tindakan yang dapat merugikan perusahaan akibat dari penyalahgunaan sumber daya (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Meskipun setiap perusahaan memiliki perbedaan keadan, seperti kode etik tata kelola perusahaan termasuk yang telah dikeluarkan dikebanyakan negara berkembang tidak hanya mengikuti rezim kepatuhan sukarela Inggris tahun 1992, tetapi juga fokus pada peningkatan perlindungan pemegang saham (Conyon, 1994, Ntim dkk 2012; Albassam dkk, 2015). Namun, kode etik tata kelola perusahaan untuk mencapai *good governance* tergantung pada tingkat kesediaan perusahaan untuk ambil bagian pada kepatuhan dan pengungkapan sukarela yang efektif (Core, 2001; Collett dan Hraskey, 2005).

Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk memeriksa khususnya di Indonesia apakah nilai-nilai Islam dapat menjadi pengaruh perbedaan pada tingkat pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan pada perusahaan yang tercatat pada *Jakarta Islamic Index* (JII). *Jakarta Islamic Index* (JII) yaitu salah satu indeks saham dengan kriteria syariah yang berada di Indonesia yang mana JII bertugas untuk menghitung indeks harga rata-rata semua jenis saham. Secara khusus penelitian ini mencari kepastian apakah komite perusahaan secara sukarela memasukan nilai-nilai Islam pada operasi bisnis, dan juga dengan struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan dapat menjelaskan perbedaan pada level pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan untuk menyelidiki hubungan antara nilai-nilai Islam dan tingkat pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan di Indonesia. Salah satunya, Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Sebagian besar negara maju dan berkembang, tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang sebagian besar berasal dari syariah (hukum Islam) (Grais dan Pallegriani, 2006; safieddine, 2009; judge, 2010). Syariah telah melekat secara menyeluruh terhadap orientasi dan memberikan panduan yang luas kepada umat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hukum, ekonomi, kehidupan, politik, agama, dan bermasyarakat (Abu-Tapanjeh, 2009; Kamla, 2009)[2]. Akibatnya, perdagangan, bisnis dan transaksi keuangan diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, syariah melarang permintaan dan penawaran bunga (*riba*) atas hutang dan deposit, dan menuntut bank untuk menggunakan dalam bentuk '*mudharabah*' (*profit-sharing*) dan '*musharakah*' (*joint-venture*) dalam perjanjian badan pengawas syariah (Lewis, 2005; Chong dan Liu, 2009). Implikasi *governance* merupakan kejelasan dari bentuk perusahaan/keuangan Islam juga membuat tantangan tata kelola perusahaan yang unik, dan memerlukan pemeriksaan yang terpisah (Lewis, 2005; Safieddine, 2009). Contoh dari teori ini, '*mudharabah*' tidak hanya meningkatkan *adverse selection* (informasi asimetris) yang merugikan, moral hazard, dan biaya pengawasan dari pemimjaman (Choudhury dan Hoque, 2006; Chong dan Liu, 2009), tetapi juga memperburuk masalah agensi dengan meningkatkan peluang untuk manajerial mengambil alih aset perusahaan (Safieddin, 2009; Vinnicombe, 2010).

Kedua, menurut Albassam (2016), kegagalan pada tata kelola perusahaan dapat menjadi masalah utama bagi ekonomi global. Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan menjadi aspek penting dalam penilaian kinerja perusahaan. Di Indonesia sendiri studi empiris yang menguji keefektifan kode etik dalam pengembangan standar untuk tata kelola perusahaan telah banyak diteliti, tetapi masih jarang yang menguji pengaruh dari nilai-nilai Islam terhadap tata kelola perusahaan itu sendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di Indonesia dengan menyelidiki serangkaian besar pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan (65 ketentuan) dengan menggunakan indeks CG yang dibangun oleh Albassam (2014) dalam periode yang baru (2016-2017).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan ini merupakan salah satu teori terpenting dalam konteks tata kelola perusahaan. seperti yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan komitmen persetujuan antara pemilik (*pricipal*) dengan managers (*agents*) untuk menjalankan perusahaan yang berkepentingan dengan pemegang saham (*shareholders*). Ekonom terkemuka dari Inggris Adam Smith mengidentifikasi terdapat beberapa konflik keagenan yang potensial yaitu pemisahaan antara kepemilikan (*shareholding*) dengan pengawasan (*management*). Selain itu, Berle dan Means (1932) secara tidak langsung menggabungkan pandangan antara Smith dengan Jensen dan Meckling (1976). Means melihat teori keagenan untuk mengurangi masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer dengan mensejajarkan kepentingan antara keduanya.

Teori keagenan menyarankan mekanisme tata kelola perusahaan dapat diperkenalkan untuk mengurangi mengurangi sifat oportunistis manajerial, sehingga dapat mengurangi biaya *agency* (Hanniffa dan Hudaib, 2006; Solomon, 2010). Lebih jelasnya, teori keagenan digunakan untuk membangun struktur tata kelola dengan adanya persetujuan secara resmi dari pemegang saham untuk mengawasi manajer.

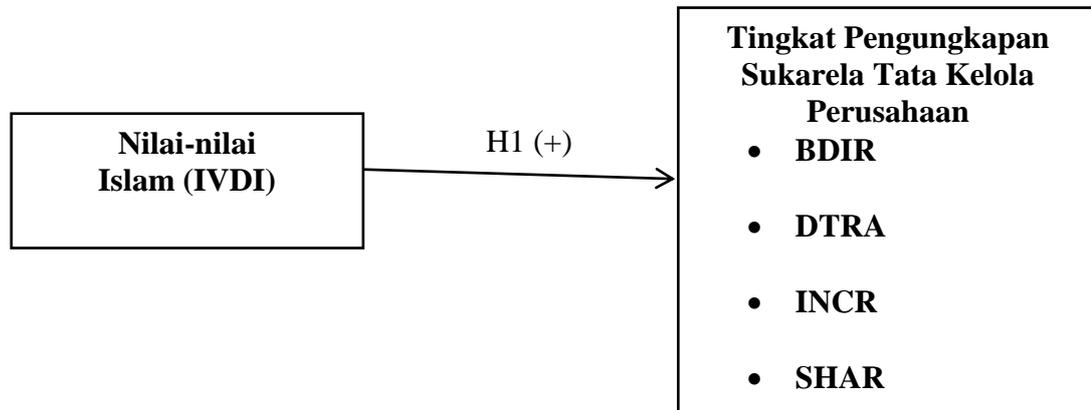
Nilai-nilai Islam

Sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya, syariah telah melekat secara menyeluruh terhadap orientasi dan memberikan panduan yang luas kepada umat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Syariah merupakan hukum Islam yang sumber dari Al-Qur'an, dan sunnah Rosul. Pada dasarnya, syariah diakui sebagai aktivitas umat Islam pasti akan terlibat dalam transaksi sekular/material, namun untuk menentukan kesepakatan semacam itu harus terarah oleh keagamaan/nilai-nilai Islam dari keadilan, kewajaran, moralitas, tanggung jawab dan kepercayaan agama keadilan sosial. Dalam konteks perusahaan publik, cara utama untuk memastikan bahwa transaksi bisnis perusahaan tersebut sesuai dengan syariah adalah : (i) memberikan laporan independen kepada pemegang saham mengenai kepatuhan manajemen dengan prinsip/nilai bisnis sesuai syariah; dan (ii) mengaudit rekening perusahaan untuk memverifikasi pembayaran pajak agama Islam (zakat) yang akurat dan menggunakan pinjaman sesuai syariah (Lewis, 2005). Namun, supaya lebih efektif untuk memantau dan memberikan saran kepada manajer, perusahaan harus menggambarkan akuntabilitas, independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan pengungkapan (Lewis, 2005; Grais dan Pellegrini, 2006).

Tata Kelola perusahaan

Telah banyak peneliti yang memberikan definisi tentang tata kelola perusahaan. *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI) pada publikasi pertamanya menggunakan definisi Cadbury Committee, tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan mengatur hubungan antara pemegang kepentingan baik itu intern maupun ekstern seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemerintah dan juga pemegang kepentingan lainnya yang memiliki hak dan kewajiban mereka atas perusahaan tersebut.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Nilai-nilai Islam yang dimaksud merupakan nilai-nilai Islam dalam aspek ekonomi syariah seperti pembayaran pinjaman berdasarkan syariah Islam, transaksi perusahaan juga sesuai dengan hukum Islam. Pada saat ini, cara utama untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan bisnis dengan transaksi yang sesuai dengan syariah antara lain dengan memberikan laporan yang independent kepada pemegang saham mengenai kepatuhan manajemen dengan prinsip nilai bisnis Islam, dan mengaudit akun perusahaan untuk untuk memverifikasi pembayaran zakat yang akurat dan pinjaman yang sesuai dengan syariah.

Meskipun dalam Islam akuntabilitas yang utama yaitu kepada Allah, namun secara tidak langsung juga mengharuskan perusahaan untuk bersifat adil, tepat waktu dan transparan dalam pengungkapan fakta keuangan kepada seluruh penggunanya. Sehingga perusahaan yang dikategorikan sesuai perusahaan Islam dapat dibilang lebih tunduk terhadap pemantauan dan pengawasan dibandingkan perusahaan lain. Selain itu berdasarkan teori agency, perusahaan yang memasukan nilai-nilai Islam dalam operasi bisnis mereka menandakan niat mereka untuk berkomitmen pada tata kelola perusahaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen atau yang biasa disebut dengan variabel terikat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan pada laporan keuangan perusahaan. Variabel ini diukur menggunakan *corporate governance disclosure index* (CGI) yang disusun oleh Albassam (2014) yang telah disesuaikan dengan tata kelola perusahaan yang berlaku di Indonesia. Indeks ini dibuat untuk mengukur empat area pengungkapan utama yang terdiri dari: (i) Dewan Direksi (BDIR); (ii) pengungkapan dan transparansi (DTRA); (iii) internal kontrol dan manajemen resiko (INCR); dan hak pemegang saham (SHAR). CGI ini terdiri 65 item, dimana 35 item untuk BDIR, 16 item untuk DTRA, 6 item untuk INCR, dan 8 item untuk SHAR

Tabel 1
Ketentuan dan Pengukuran CGI

Informasi yang diungkapkan	Range Skor	Jumlah Skor per sub
Dewan direksi dan Komite (BDIR)		
Struktur Direksi		
	0 - 1	
1. Apakah posisi CEO terpisah dengan pimpinan dewan direksi?	0 - 1	
2. Apakah pimpinan direksi merupakan direktur independen?	0 - 1	
3. Apakah mayoritas anggota dewan direksi adalah non-eksekutif?	0 - 1	
4. Apakah terdapat klasifikasi direksi menjadi eksekutif, non-eksekutif, dan independen dalam laporan tahunan perusahaan?	0 - 1	
5. Apakah perusahaan mengungkapkan biografi direksi di laporan tahunan perusahaan?	0 - 1	27
6. Apakah terdapat kebijakan dalam penunjukan dewan direksi?	0 - 1	
7. Apakah perusahaan mengungkapkan direksi yang tercatat sebagai anggota direksi perusahaan lain?	0 - 1	
8. Apakah direksi yang tercatat pada perusahaan lain tidak lebih dari lima perusahaan?	0 - 1	
9. Apakah perusahaan mengungkapkan jumlah rapat dewan pada laporan tahunan?	0 - 1	
10. Apakah perusahaan mengungkapkan jumlah kehadiran individu pada rapat direksi?	0 - 1	
Komite Audit		
11. Apakah perusahaan memiliki komite audit?	0 - 1	
12. Apakah perusahaan menjelaskan secara singkat yuridiksi dan tugas komite?	0 - 1	
13. Apakah komite audit memiliki jumlah yang cukup anggota non-eksekutif?	0 - 1	
14. Apakah ketua komite audit adalah independen?	0 - 1	
15. Apakah nama ketua komite diungkapkan?	0 - 1	
16. Apakah perusahaan memiliki komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota?	0 - 1	
17. Apakah keanggotaan komite audit diungkapkan pada laporan tahunan?	0 - 1	
18. Apakah perusahaan mengungkapkan jumlah rapat komite audit pada laporan tahunan?	0 - 1	
19. Apakah perusahaan mengungkapkan jumlah kehadiran individu rapat komite audit pada laporan tahunan?	0 - 1	
Komite Nominasi		
20. Apakah perusahaan memiliki komite?	0 - 1	
21. Apakah perusahaan menjelaskan secara singkat yuridiksi dan tugas komite?	0 - 1	
22. Apakah komite memiliki jumlah yang cukup anggota non-eksekutif?	0 - 1	
23. Apakah ketua komite adalah independen?	0 - 1	

Informasi yang diungkapkan	Range Skor	Jumlah Skor per sub
24. Apakah nama ketua komite diungkapkan?	0 - 1	
25. Apakah kenggotaan komite diungkapkan ?	0 - 1	
26. Apakah jumlah rapat komite diungkapkan?	0 - 1	
27. Apakah jumlah kehadiran individu rapat komite?	0 - 1	
Komite Remunerasi		
28. Apakah perusahaan memiliki komite?	0 - 1	
29. Apakah perusahaan menjelaskan secara singkat yuridiksi dan tugas komite?	0 - 1	
30. Apakah komite memiliki jumlah yang cukup anggota non-eksekutif?	0 - 1	
31. Apakah ketua komite adalah independen?	0 - 1	
32. Apakah nama ketua komite diungkapkan?	0 - 1	
33. Apakah kenggotaan komite diungkapkan ?	0 - 1	
34. Apakah jumlah rapat komite diungkapkan?	0 - 1	
35. Apakah jumlah kehadiran individu rapat komite?	0 - 1	
Pengungkapan dan Transparansi (DTRA)		
36. Apakah perusahaan mmengungkapkan struktur kepemilikanya di laporan tahunan?	0 - 1	
37. Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh direktur?	0 - 1	
38. Apakah perusahaan mengungkapkan kompensasi dan remunerasi yang dibayarkan kepada dewan direksi dan komisaris?	0 - 1	
39. Apakah kompensasi tahunan masing-masing direktur sama dengan atau kurang 10% dari keuntungan perusahaan?	0 - 1	
40. Apakah perusahan mengungkapkan jumlah remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan kepada CEO/MD/GM di laporan tahunan tahunan?	0 - 1	16
41. Apakah perusahaan mengungkapkan jumlah remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen atas di laporan tahunan?	0 - 1	
42. Apakah laporan tahunan perusahaan mencakup rincian operasi perusahaan dan penjelasan apa saja perbendaan dari tahun sebelumnya?	0 - 1	
43. Apakah perusahaan mengungkapkan semua jumlah pinjaman dan pembayaran yang dibayarkan perusahaan selama tahun laporan keuangan?	0 - 1	
44. Apakah perusahaan memberikanan ringkasan komparatif aset dan kewajiban 5 tahun terakhir?		
45. Apakah perusahan menyediakan rencana strategis dan tujuan utama perusahan di laporan tahunan?		
46. Apakah perusahaan mengungkapkan kegiatan pemegang saham?	0 - 1	
47. Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dividen yang jelas dalam laporan tahunan?	0 - 1	

Informasi yang diungkapkan	Range Skor	Jumlah Skor per sub
48. Apakah perusahaan memberikan informasi tentang hubungan kepada pihak berelasi dan direksi perusahaan jika tidak ada kontrak pihak terikat, perusahaan harus menyatakan laporan yang sesuai?	0 - 1	
49. Apakah perusahaan mengungkapkan hukuman atau pencabutan preferentif yang dikenakan perusahaan oleh badan pengawas?	0 - 1	
50. Apakah perusahaan memberikan narasi mengenai kemampuan perusahaan menjadi going concern?	0 - 1	
51. Apakah perusahaan memberikan laporan kepatuhan/ketidakpatuhan atau penerapan terhadap ketentuan GCG?	0 - 1	
Internal Kontrol dan Manajemen Resiko (INCR)		
52. Apakah perusahaan mengungkapkan hasil laporan audit terhadap efektivitas pengendalian internal di laporan tahunan perusahaan?	0 - 1	
53. Apakah perusahaan menjelaskan prosedur pengendalian untuk manajemen kontrol perusahaan pada laporan tahunan?	0 - 1	
54. Apakah perusahaan memberikan deskripsi tentang resiko perusahaan?	0 - 1	
55. Apakah laporan tahunan telah disetujui oleh dewan direksi dan ditandatangani oleh 1-Direktur, 2-CFO?	0 - 1	6
56. Apakah perusahaan memberikan pernyataan bahwa laporan tahunan tidak keluar dari standar akuntansi yang berlaku?	0 - 1	
57. Apakah perusahaan mengungkapkan struktur tata kelola perusahaan yang tidak bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang berlaku?	0 - 1	
Hak Pemegang saham (SHAR)		
58. Apakah pertemuan dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun laporan tahunan?	0 - 1	
59. Apakah perusahaan mengungkapkan agenda rapat dalam pengumuman rapat di BEI?	0 - 1	
60. Apakah pemegang saham memiliki hak untuk menunjuk orang lain?	0 - 1	
61. Apakah perusahaan menggunakan voting secara akumulatif ?	0 - 1	8
62. Apakah perusahaan memberikan pengumuman pertemuan RUPS paling lambat 20 hari sebelum tanggal pertemuan?	0 - 1	
63. Apakah perusahaan segera memberikan informasi hasil pertemuan RUPS?	0 - 1	
64. Apakah pertemuan RUPS dilaksanakan pada kurun waktu enam bulan setelah berakhir tahun buku?	0 - 1	
65. Apakah perusahaan mengungkapkan kontribusi sosial?	0 - 1	

Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen yang digunakan di penelitian ini yaitu nilai-nilai Islam. Variabel independen ini diukur menggunakan Islamic Value Disclosure Index (IVDI), yang terdiri dari 10 nilai-nilai Islam yang meliputi secara luas pada kegiatan bisnis perusahaan dan juga pada prinsip keuangannya. Berikut merupakan ketentuan IVDI yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Ketentuan Islamic Value Disclosure Index (IVDI)

Item IVDI: Informasi yang diungkapkan	Range skor	Total skor per item
1. Apakah terdapat dewan pengawas syariah	0-1	
2. Apakah perusahaan tersebut memberikan pernyataan eksplisit/formal mengenai kesediaannya untuk secara sukarela menerapkan/menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam operasi bisnis dan/atau transaksi investasi.	0-1	
3. Apakah sebuah narasi mengenai fakta bahwa dana dan pinjaman perusahaan itu berdasarkan bunga bebas (riba) diungkapkan	0-1	
4. Apakah perusahaan tersebut mengungkapkan keuangan Islam dan konvensional secara terpisah pada akun keuangannya.	0-1	
5. Apakah direksi perusahaan memberikan narasi yang jelas mengenai apakah transaksi perusahaan konsisten dengan hukum Islam.	0-1	10
6. Apakah perusahaan mengungkapkan pembayaran zakat		
7. Apakah terdapat jumlah zakat tahun sebelumnya	0-1	
8. Apakah perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai 'Nagi' (yaitu, transaksi bisnis perusahaan dan/atau investasi sesuai 'Syariah') oleh para ilmuwan Syariah.	0-1	
9. Apakah sebuah narasi mengenai adanya unit review dan pemantauan 'Syariah' yang menerapkan nilai-nilai Islam diungkapkan.	0-1	
10. Apakah perusahaan memiliki kode etik	0-1	
10 item IVDI		

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di JII (*Jakarta Islamic Index*). Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sensus, atau menggunakan seluruh perusahaan yang pernah terdaftar di *Jakarta Islamic Index* pada tahun 2016-2017.

Metode Analisis

Pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel dependen yaitu pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan dan satu variabel independen yaitu nilai-nilai Islam, sehingga penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana. Metode ini dapat mengetahui apakah kedua variabel yang diteliti terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan seberapa besar tingkat hubungan antara keduanya. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini:

$$CGI = \alpha + \beta IVDI$$

Keterangan:

CGI	= Pengungkapan Sukarela Tata kelola Perusahaan
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
IVDI	= Nilai-nilai Islam

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek penelitian

Objek penelitian ini merupakan perusahaan yang pernah tercatat dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2016-2017.

Tabel 3
Objek Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan JII tahun 2016	36
2	Perusahaan JII tahun 2017	36
3	Jumlah perusahaan yang pernah terdaftar di JII tahun 2016-2017	76

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi untuk setiap variabel per tahun dan seluruh periode 2016-2017. Adanya analisis statistik deskriptif berguna sebagai informasi yang jelas dan mudah dipahami. Tabel hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	IVDI	CGI
Mean	27,11	74,70
Median	30,00	74,62
Std. Deviation	6,89	9,89
Minimum	20,00	47,69
Maximum	50,00	89,47

Nilai-nilai Islam yang diukur menggunakan IVDI merupakan variabel independen dari penelitian ini. Dari 10 item IVDI, rata-rata nilai Islam memenuhi 27,11 dengan nilai minimum 20,00 sampai nilai maksimum 50,00, nilai median 30,00, dan standar deviasi 6,89. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dari nilai deviasi standar, tetapi nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan nilai median sehingga variabel ini memiliki data yang berdistribusi miring negative.

Variabel dependen dari penelitian ini yaitu pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan CGI memiliki range dari nilai minimum 47.69 sampai nilai maksimum 89,47. CGI memiliki nilai rata-rata 74.70 nilai median sebesar

74.62 deviasi standar sebesar 9,89. Data CGI juga memiliki persebaran data yang positif karena nilai rata-rata CGI lebih besar dari nilai median.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	P-Value	β	Hasil
H1	Terdapat pengaruh positif antara nilai-nilai Islam dan tingkat kepatuhan pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan	0,003	0,337	Diterima

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Terdapat pengaruh positif antara nilai-nilai Islam dan tingkat kepatuhan pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang diukur dengan IVDI berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela yang diukur dengan CGI.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh dari nilai-nilai Islam terhadap pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu semua perusahaan di JII yang pernah terdaftar di periode antara 2016-2017 yang terdiri dari 76 perusahaan.

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, didapatkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara antara nilai-nilai Islam terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan. Hasil ini sesuai dengan pengujian hipotesis. Semakin banyak nilai-nilai Islam diungkapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan dari penelitian ini, yaitu:

1. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai dari adjusted r square masih bernilai relatif kecil, yang menunjukkan masih terdapat banyak factor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan sukarela tata kelola perusahaan selain nilai-nilai Islam.
2. Perusahaan dalam melakukan pengungkapan nilai-nilai Islam dirasa masih relatif sedikit.
3. Banyaknya provisi atau ketentuan dari CGI yang dapat menyebabkan beberapa provisi tersebut terlewatkan atau salah.

Saran

Dilihat dari pengumpulan data maupun hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti berikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan selanjutnya. Berikut merupakan saran dari peneliti:

1. Untuk DES, JII

Dalam menuntukan saham syariah, regulasi seperti pengungkapan jumlah zakat dan dewan pengawas syariah dapat ditambah sehingga perusahaan yang terdaftar di DES maupun JII dan lebih menunjukkan sisi ke Islamnanya.

2. Untuk perusahaan

Pada saat penelitian, peneliti menemukan sedikit perusahaan yang mengungkapkan nilai-nilai Islam. Dan belum terdapat dewan pengawas syariah. Perusahaan diharapkan dapat membentuk dewan pengawas syariah sehingga nilai-nilai Islam dapat lebih banyak yang diungkapkan dan menjadi daya Tarik lain bagi investor yang tertarik pada saham syariah.

REFERENSI

- Abdelsalam, O. and Street, D. (2007), "Corporate governance and the timeliness of corporate internet reporting by U.K. listed companies". *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 16 No. 2, pp. 111-130.
- Abu-Tapanjeh, A. (2009), "Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles", *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 20 No. 5, pp. 556-567.
- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*
- Albassam, W.M., Ntim, C.G (2017), "The effect of Islamic values on voluntary corporate governance disclosure: the case of Saudi listed firms", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 Iss 2 pp. -
- AlBassam, W.M., Ntim, C.G., Opong, K.K., and Downs, Y. (2015). "Corporate boards and ownership structure as antecedents of corporate governance disclosure in Saudi Arabian publicly listed corporations", *Business & Society*, Forthcoming.
- Al-Moataz, E. and Hussainey, K. (2012). "Determinants of corporate governance disclosure in Saudi Arabia. *Journal of Economics and Management*", King Abdulaziz University
- Al-Nodel, A. and Hussainey, K. (2010), "Corporate governance and financing decisions by Saudi companies", *Journal of Modern Accounting and Auditing*, Vol. 6 No. 8, pp. 1-14.
- Al-Razeen, A. and Karbhari, Y. (2004), "Annual corporate information: Importance and use in Saudi Arabia", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 19 No. 1, pp.117-133
- Alsaeed, K. (2006), "The association between firm-specific characteristics and disclosure: The case of Saudi Arabia", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 5, pp. 476-496
- Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
- Barako, D., Hancock, P. and Izan, H. (2006), "Factors influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan companies", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 4 No. 2, pp. 107-125.
- Cheng, E. and Courtenay, S. (2006), "Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure", *International Journal of Accounting*, Vol. 41 No. 3, pp. 262-289.
- Chong, B. and Liu, M. (2009), "Islamic banking: Interest-free or interest-based?", *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol. 17 No. 1, pp. 125-144.
- Choudhury, M. and Hoque, M. (2006), "Corporate governance in Islamic perspective", *Corporate Governance*, Vol. 6 No. 2, pp. 116-128.
- Collett, P. and Hraskey, S. (2005), "Voluntary disclosure of corporate governance practices by listed Australian companies", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 12 No. 2, pp. 188-196.
- Conyon, M. (1994), "Corporate governance changes in UK companies between 1988 and 1993", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 2 No. 2, pp. 87-99.

- Core, J. (2001), "A review of the empirical disclosure literature: Discussion", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 31 No. 1-3 pp. 441-456. Eng dan Mak *Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI)*
- Guidry, R. and Patten, D. (2012), "Voluntary disclosure theory and financial control variables: An assessment of recent environmental disclosure research", *Accounting Forum*, Vol. 36 No 2, pp. 81- 90.
- Haniffa, R. and Cooke, T. (2002), "Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations", *Abacus*, Vol. 38 No 3, pp. 317-349.
- Haniffa, R. and Hudaib, M. (2006), "Corporate governance structure and performance of Malaysian listed companies" *Journal of Business, Finance and Accounting*, Vol. 33 No. 7-8, pp. 1034-1062.
- Hussainey, K. and Al-Najjar, B. (2012), "Understanding the determinants of Risk/Metric/ISS ratings of the quality of UK companies corporate governance practice", *Canadian Journal of Administrative Sciences*, Vol. 29 No. 4, pp. 366-377.
- Hussainey, K. and Al-Nodel, A. (2008), "Corporate governance online reporting by Saudi companies", *Research in Accounting in Emerging Economies*, Vol.8, pp. 39-64.
- Jensen. M.C and W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*
- Judge, W. (2010), "Corporate governance mechanisms throughout the world", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 18 No. 3, pp. 159-160.
- Kamla, R. (2009), "Critical insights into contemporary Islamic accounting", *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 20 No. 8, pp. 921-932.
- Kusumawati dan Riyanto, 2005. Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap kinerja
- Lewis, M. (2005), "Islamic corporate governance", *Review of Islamic Economics*, Vol. 9 No. 1, pp. 5-29.
- Ntim, C.G. (2015a), "Corporate governance, corporate health accounting and firm value: The case of HIV/AIDS disclosures in Sub-Saharan Africa", *International Journal of Accounting*, Forthcoming.
- Ntim, C.G. (2015b), "Board diversity and organizational valuation: Unravelling the effects of ethnicity and gender", *Journal of Management and Governance*, Vol. 19, pp.167-195.
- Ntim, C.G. and Soobaroyen, T. (2013a), "Black economic empowerment disclosures in South Africa: The influence of ownership and board characteristics", *Journal of Business Ethics*, Vol. 116 No. 1, pp.121-138.
- Ntim, C.G. and Soobaroyen, T. (2013b), "Corporate governance and performance in socially responsible corporations: New empirical insights from a neo-institutional framework", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 2 No. 5, pp.468-494.
- Ntim, C.G., Lindop, S., and Thomas, D. (2013), "Corporate governance and risk reporting in South Africa: A study of corporate risk disclosures in the pre- and post-2007/2008 global financial crisis period", *International Review of Financial Analysis*, Vol. 30, pp.363-383.
- Ntim, C.G., Opong, K. and Danbolt, J. (2012a), "The relative value relevance of shareholder versus stakeholder corporate governance disclosure policy reforms in South Africa", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 20 No. 1, pp. 84-105.

Ntim, C.G., Soobaroyen, T., and Broad, M.J. (2015c), "Governance structures, voluntary disclosures and public accountability: The case of UK higher education institutions", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Forthcoming. OJK No. 53/POJK.04/2015 Ijarah

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

- Rouf, A. (2011), "Corporate characteristics, governance attributes and the extent of voluntary disclosure in Bangladesh", *African Journal of Business Management*, Vol. 5 No. 19, pp. 7836-7845.
- Safieddine, A. (2009), "Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory", *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 17 No. 2, pp. 142-158.
- Sarker, M. (2012), "Islamic business contracts, agency problem and the theory of the Islamic firm", *International Journal of Islamic Financial Services*, Forthcoming.
- Soliman, M. (2012a), "Ownership structure, board composition, and dividend policy: Evidence from Saudi Arabia", *Working Paper*, Arab Academy for Sciences and Technology.
- Soliman, M. (2012b), "Ownership concentration and firm financial performance: Evidence from Saudi Arabia", *Working Paper*, Arab Academy for Sciences and Technology.
- Soobaroyen, T. and Ntim, C. (2013), "Social and environmental accounting as symbolic and substantive means of legitimation: The case of HIV/AIDS in South Africa", *Accounting Forum*, Vol. 37 No. 2, pp. 92-109.
- Tsamenyi, M., Enninful-Adu, E. and Onumah, J. (2007), "Disclosure and corporate governance in developing countries: Evidence from Ghana", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 22 No. 3, pp. 319- 334.
- Vinnicombe, T. (2010), "AAOIFI reporting standards: Measuring compliance", *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, Vol. 26 No. 1, pp. 55-65.